



IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN

M.Husaini¹, Siti Raudah², Marizka Amaliya³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

³Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

E-mail: muhammadhusaini10081986@gmail.com

Article History:

Received: 25-05-2023

Revised: 30-05-2023

Accepted: 03-06-2023

Keywords:

Implementation,
Expansion Program,
UMKM

Abstract: *The regions in accordance with their authority make arrangements regarding the development, arrangement and guidance of UMKM, but unfortunately there are still several obstacles such as: limited facilities and minimal empowerment from the relevant agencies. For this reason, this study aims to find out about the implementation of the UMKM outreach expansion program in Balangan Regency and the factors that influence it. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data source was taken through snowball sampling with a total of 10 people. After the data is collected, it is then analyzed using techniques including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Testing the credibility of the data by extending observations, increasing persistence, triangulation, using reference materials and member checks. The results of the research show that the implementation of the UMKM outreach expansion program in Balangan Regency is quite good in terms of: organizational structure indicators. provide encouragement, strengthen and strengthen the organization, management and business of Cooperatives, Micro Enterprises, Small and Medium Enterprises, indicators regarding work procedures are not good due to limited facilities and activity schedule indicators are not good because the schedule of activities is uncertain depending on circumstances. The factors that influence the implementation of the UMKM outreach expansion program in Balangan Regency consist of supporting factors including: There are clear technical instructions. Inhibiting factors include: Lack of empowerment and limited facilities in developing market access for industrial products of small and medium enterprises. From the problems above, the authors suggest: To the Head of the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Balangan Regency, they should schedule routine business development and development activities, for example once every 1 or 2 months.*

Employees should make proposals for additional facilities and infrastructure in supporting the coaching and development activities of the UMKM outreach expansion program.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Dimasa sekarang ini sudah banyak merambat para pelaku usaha lokal di setiap daerah yang ada di Indonesia. Para pelaku usaha tersebut yang sudah lama pun hingga kini masih ada yang tetap berjalan dengan usaha yang gelutinya. Usaha lokal ini sering disebut dengan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Usaha kecil dan menengah adalah usaha yang sebagian besar dilakukan oleh rakyat banyak dan hasil usaha tersebut dibutuhkan oleh rakyat itu sendiri. Mereka membentuk usahanya dengan modal sendiri atau orang lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain yang mendapatkan revenue dari usahanya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang memiliki jumlah kekayaan dan penjualan tahunan tertentu dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang untuk menentukan kategori usaha tersebut. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sejarah membuktikan, ketika terjadi krisis moneter di tahun 1997 banyak usaha besar yang tumbang karena dihantam krisis tersebut, namun UMKM tetap eksis dan menopang kelanjutan perekonomian Indonesia.

Seperti peraturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, perlunya kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, Kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta. Serta pada pasal 14 Nomor 7 tahun 2014, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada Undang-Undang yang sama pun, perlunya upaya pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu sentra usaha kecil menengah yang saat ini berjalan ada di daerah kabupaten Balangan tercatat hingga tahun 2022 lebih dari 2000 pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) di Kabupaten Balangan kembali diusulkan untuk menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Data tersebut sudah dikirimkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan. Diantara 2000 pelaku UKM tersebut sebagian berada di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan yang banyak di padati dengan masyarakat berstatus pedagang kuliner, namun sayangnya di tengah usaha kecil menengah yang sedang ramai di Kelurahan Batu Piring tersebut ditemui beberapa kendala seperti Minimnya pelatihan dan pembinaan oleh Dinas terkait dan terbatasnya fasilitas. Terbatasnya fasilitas dalam mengembangkan akses pasar bagi produk-produk industri usaha kecil dan menengah, seperti terbatasnya sarana prasarana maupun permodalan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

mengakibatkan pelaku usaha kecil dan menengah kebanyakan terkendala biaya dalam mengembangkan usahanya.

LANDASAN TEORI

Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2012;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2012: 68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi program dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Menurut Friedrich (dalam Wahab 2012: 3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Program Pemasaran UMKM

Program Pemasaran adalah program perusahaan dalam memasarkan Barang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Penjual Langsung melalui jaringan pemasaran dengan bentuk Penjualan Langsung secara Single Level atau Penjualan Langsung secara Multi Level. Tujuan program perluasan perjangkauan pemasaran adalah memahami kebutuhan dan keinginan suatu pasar tertentu dan memilih pasar yang paling dapat mereka layani dengan baik. Selanjutnya mereka dapat mengembangkan produk dan jasa yang akan menciptakan nilai dan kepuasan bagi pelanggan dalam pasar tersebut, yang kemudian menghasilkan penjualan dan laba bagi perusahaan. Konsep pasar akhirnya membawa kita kepada konsep pemasaran. Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan pertukaran dan hubungan, dengan tujuan menciptakan nilai dan memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jadi, kita kembali pada definisi mengenai pemasaran sebagai sebuah proses, yang dengannya seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling menukarkan produk dan nilai dengan orang lain. Proses pertukaran mencakup beberapa hal. Penjual harus mencari pembeli, mengidentifikasi kebutuhan mereka, merancang produk yang

baik, menetapkan harga atas produk dan jasa tersebut, mempromosikannya, menyimpan dan mengirimkannya. Kegiatan seperti pengembangan produk, riset, komunikasi, distribusi, penetapan harga dan pelayanan adalah inti kegiatan pemasaran. Setiap bagian pada system menambahkan nilai untuk tingkat berikutnya. Jadi kesuksesan perusahaan tidak hanya tergantung pada tindakan mereka sendiri, melainkan juga pada seberapa baik keseluruhan sistem melayani kebutuhan konsumen akhir.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni : Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas terhadap hasil data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2014) antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2012: 68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi program perluasan jangkauan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan cukup baik dilihat dari : Indikator struktur organisasi cukup baik, hal ini dilihat dari adanya struktur organisasi yang ada Dinas terkait pembinaan UKM dan indikator Sumber daya manusia yang berkualitas cukup baik, dilihat dari adanya Kepala Bidang UKM yang ada di Desprindagkop UKM bersama stafnya yang ahli dalam memberikan pelatihan dan pembinaan . Indikator petunjuk teknis cukup baik, Adapun petunjuk teknisnya adalah 1) Perencanaan tersusun secara terprogram, seperti perencanaan sosialisasi program, sasaran perencanaan, dan strategi perencanaan. 2) Pelaksanaan berhasil melalui kegiatan pembinaan, seperti kegiatan penyelenggaraan pelatihan. 3) Menambah wawasan pelaku UKM terkait berwirausaha, pelaku UKM mampu memanfaatkan potensi di dalam dirinya, meningkatnya kualitas hidup, dan membina berwirausaha secara mandiri, indikator mengenai tujuan yang hendak dicapai cukup baik, untuk memberi dorongan, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, indikator mengenai prosedur kerja belum baik karena terbatasnya fasilitas dalam mengembangkan akses pasar bagi produk-produk

industri usaha kecil dan menengah, seperti terbatasnya sarana prasarana maupun permodalan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan mengakibatkan pelaku usaha kecil dan menengah kebanyakan terkendala biaya dalam mengembangkan usahanya, indikator jadwal kegiatan belum baik karena jadwal kegiatan tidak menentu tergantung keadaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program perluasan jangkauan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan terdiri dari faktor pendukung meliputi : Adanya petunjuk teknik yang jelas, Petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Faktor penghambat meliputi : Kurangnya pemberdayaan hal ini dilihat dari minimnya kegiatan pemberdayaan yang harusnya dilakukan sebab keterbatasan anggaran dan terbatasnya fasilitas dalam mengembangkan akses pasar bagi produk-produk industri usaha kecil dan menengah, seperti terbatasnya sarana prasarana maupun permodalan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan mengakibatkan pelaku usaha kecil dan menengah kebanyakan terkendala biaya dalam mengembangkan usahanya.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi program perluasan jangkauan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan cukup baik dilihat dari : Indikator struktur organisasi hal ini dilihat dari adanya struktur organisasi, indikator Sumber daya manusia yang berkualitas dan indikator petunjuk teknis cukup baik, indikator mengenai tujuan yang hendak dicapai cukup baik untuk memberi dorongan, memperkokoh dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, indikator mengenai prosedur kerja belum baik karena terbatasnya fasilitas dan indikator jadwal kegiatan belum baik karena jadwal kegiatan tidak menentu tergantung keadaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program perluasan jangkauan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan terdiri dari faktor pendukung meliputi : Adanya petunjuk teknik yang jelas. Faktor penghambat meliputi : Kurangnya pemberdayaan dan terbatasnya fasilitas dalam mengembangkan akses pasar bagi produk-produk industri usaha kecil dan menengah.

SARAN

Dari permasalahan di atas peneliti menyarankan : Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, hendaknya mengagendakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha secara rutin misalnya setiap 1 atau 2 bulan sekali. Kepada pegawai hendaknya melakukan pengusulan penambahan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan program perluasan jangkauan UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anonim, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [2] Anonim, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Perlunya Kemitraan Antara Usaha

- Besar Dan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Serta Pemerintah Dan Swasta.
- [3] Anonim, Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 Tanggal 29 Januari 2003.
- [4] Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- [5] Cica Nopika Sari, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli, 2018. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga” Universitas Riau.
- [6] Firdaus, Gusti Muhammad Ferry, 2018. “Pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) oleh hypermart berbasis program kemitraan kota palangka raya”. IAIN Palangkaraya.
- [7] J.R,Raco 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo.
- [8] Luthans, F. 2015. *Organizational Behavior*. New York : McGraw-hill.
- [9] Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2016. *Human Resource Management : Manajemen*
- [10] Mahsun, 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* . Yogyakarta : BPFE.
- [11] Mangkuprawira, Sjafri., 2009. *Horison Bisnis, Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. PT. Gramedia. Jakarta.
- [12] Mangkunegara, Anwar Prabu . 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- [13] Mangkuprawira, Sjafri., 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- [14] Robbins, Stephen P., 2016. *Perilaku Organisasi*, PT Indeks, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- [15] Riant D. Nugroho, 2014, *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta:Gramedia,).
- [16] Sule Erni Tisnawati & Saefullah Kurniawan. 2018. “Pengantar Implementasi”. Jakarta. Prenada Media Group.
- [17] Wahab, 2018. *Analisis kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [18] Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- [19] Wirawan, 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat. Jakarta.